

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Malang: Setara Press
- Huda, Ni'matul. 2017. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Husen, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung : CV. Utomo
- Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: PT. Alumni
- Lubis, M. Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Lubis, Marzuki. 2011. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Nawawi, H. Handari. 1994. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, edisi revisi*. Jakarta: Penerbit Grasindo
- Poerwodarminto, WJS. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sarinah, dan Mardalena. 2017 *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: deepublish
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- Sirajudin, Anis Ibrahim, Nuruddin Haddy, Umar Sholahuddin. 2009. *Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*. Malang : Setara Press
- Situmorang, Viktor M dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*. Jakarta: Raja Buku
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonom Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Jurnal

Somad, Kemas Arsyad. 2011. *Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Semarang: Masalah-Masalah Hukum. Vol. 40, No. 4:479.

Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Jenis-Jenis Pemeriksaan*.

Diakses dari <http://kendari.bpk.go.id/?p=1970>. (4 Januari 2018)

Diskominfo Pemerintah Kabupaten Kudus. 2017. *Kudus dalam Angka 2015*.

Diakses dari: <http://www.kuduskab.go.id/category/statistik>. (7 Januari 2018)

Mashduqi, A. Ali. 2015. *Sistem Pengendalian Intern dan Ekstern Pemerintah*.

Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21142-sistem-pengendalian-intern-dan-ekstern-pemerintah>. (4 Januari 2018)